
Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020

Wizdanul Ma'arif¹, Sakir², Fairuz Arta Abhipraya³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email Korespondensi: fairuz.arta.fisip17@mail.umy.ac.id

ABSTRACT

The article describes the role of Bawaslu in the 2020 regional head elections in Tasikmalaya Regency in resolving and preventing any disputes and fraud that occur. The research method used is descriptive qualitative research through interviews and observations of the research object which is used as primary data. Meanwhile, secondary data was obtained through international, and national journals, reports, and literature studies. The results of the study show that there are 3 main roles, among others, firstly, the role of Bawaslu in supervising the 2020 Tasikmalaya Regency elections as an institution that has the authority to prevent violations during the elections. Second, is the inconsistency of Bawaslu when carrying out its authority in the 2020 Tasikmalaya Regency general election. Third, the duties and authorities of Bawaslu and its obligations are to create elections with integrity and must increase community participation in elections in order to be able to make the general election successful.

Keywords: Role, duties, authority, Bawaslu

ABSTRAK

Artikel menjelaskan tentang peran Bawaslu dalam pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 dalam menyelesaikan dan melakukan pencegahan setiap sengketa dan kecurangan yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi terhadap objek penelitian yang dijadikan sebagai data primer. Sementara data sekunder diperoleh melalui jurnal internasional, nasional, laporan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 peran utama antara lain, pertama peran Bawaslu didalam pengawasan pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2020 sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran ketika berlangsungnya pilkada. Kedua, kegagalan Bawaslu ketika menjalankan wewenangnya pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020. Ketiga, tugas dan wewenang dari bawaslu dan kewajibannya yaitu untuk menciptakan pemilihan

umum yang berintegritas dan harus meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pemilu agar dapat mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum.

Kata Kunci: Peran, tugas, wewenang, Bawaslu

PENDAHULUAN

Bawaslu adalah salah satu Lembaga yang menjadi penyelenggara pemilu yang mana didalam tugas dan wewenangnya terdapat pencegahan terhadap pelanggaran yang sering terjadi ketika berjalanya pemilu. Pengawasan dalam di dalam negara demokrasi sangat penting sekali sebagaimana para ahli berpendapat bahwasanya secara pengertian dari pengawasan menurut R. Terry yang dikutip Muchsan mengatakan bahwasanya ; “Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan.” Secara pengertian menurut para ahli bahwasanya pengawasan itu menitik beratkan pada suatu tindakan evaluasi dan koreksi dalam hasil yang dicapai, dengan tujuan agar hasil tersebut sesuai dengan yang direncanakan. tindakan pengawasan itu tidak dilakukan dalam suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan, akan tetapi dilihat Ketika suatu kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu

Pada dasarnya dengan adanya Bawaslu ini agar mampu memberikan edukasi dan Kerjasama dengan masyarakat terhadap kejanggalan Bawaslu didalam kelancaran pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya. Diantara kepentingan yang sangat penting didalam pemilu adalah partisipasi masyarakat didalam pengawasan pemilihan umum, semakin banyak partisipasi dan kontribusi masyarakat didalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2020 maka akan semakin sedikit kecurangan yang akan terjadi. Disetiap forum masyarakat yang telah dirancang oleh Bawaslu merupakan salahsatu bentuk upaya agar masyarakat mampu mengawasi segala kecurangan yang terjadi.

Politik uang adalah permasalahan yang sering terjadi didalam pemilu, sangat sulit sekali mendapatkan pelaku dikarnakan kurangnya pengawasan. Money politic atau bisa disebut dengan politik uang bisa diartikan dengan suatu keadaan dimana uang yang dipergunakan untuk membeli sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang (Sela, 2018). Menurut ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dalam wawancara berpandangan bahwasanya politik uang merupakan pelanggaran yang sangat strategis sekali utuk para pelaku dengan tujuan agar mereka bisa merebut suara para calon pemilih, selain itu ada juga kekurangan dari masyarakat diantaranya dari segi SDM(sumber daya manusia) dan dalam segi ekonomi yang menjadi kesempatan bagi para pelaku pelanggaran dalam pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2020. Maka daripada itu karna adanya kecurangan yang terjadi pada pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2020 diperlukanya partisipasi aktif dan yang paling penting adalah kesadaran dari masyarakat yang terlibat didalam penyelenggaraan pemilihan umum pilkada 2020 yaitu sebagai calon pemilih.

Negara Indonesia yang termasuk menerapkan sistem demokrasi pemilihan umum merupakan sebuah ajang dalam rangka memilih pemimpin yang adil dan yang terpenting

didalam pemilihan umum adalah adanya pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu.sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mana membahas tentang tiga lembaga penyelenggaraan dalam pemilu antara lain : Badang Pengawas Pemilu (BAWASLU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Maka daripada itu dari ketiga hal yang tertulis bahwasanya Bawaslu sebagai pengawas didalam penyelenggara pemilhan umum, sebagai mana yang telah diatur didalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah dinyatakan adalah bahwasanya Bawaslu berwenang didalam melakukan pengawasan pemilu diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Hartika, 2019)

Dengan diadakanya Bawaslu yang bertujuan untuk mengawasi, mengontrol berjalanya pemilihan umum yang adil dan demokratis sebagaimana yang tertera didalam Pancasila sebagai dasar negara, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peranan Bawaslu didalam pemilhan umum,terutama dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 sangat berperan penting sekali karna Bawaslu harus bekerjasama dengan segala elemen baik masyarakat, ASN, TNI dan Polri,penyelenggara pemilu yang lainnya dalam mengawasi dan menyelesaikan permasalahan ketika berjalanya pemilhan umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020. Bawaslu harus memiliki strategi terutama Sumber daya manusia didalam menjalankan tugasnya karna peranan Bawaslu didalam pemilihan umum yang menentukan proses berjalanya pemilu yang diselenggarakan juga agar tidak terjadi pelanggaran sehingga menghasilkan kerugian oleh berbagai pihak. (Satrio, 2018)

Pelanggaran yang sering terjadi dalam pemilu dikalangan masyarakat adalah sengketa pemilu dan terjadinya serangan fajar atau bisa disebut money politik karna masyarakat yang awam dan buta politik sehingga mudah di iming-iming oleh uang.namun kasus pelanggaran tersebut bukan hanya kesalahan masyarakat yang buta akan politik saja.akan tetapi mereka yang mempunyai materi berlimpah dan dengan mudah membodohi masyarakat hanya dengan uang.peran bawaslu dalam pemilihan umum sangat penting sekali terutama dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat yang buta politik.seorang penyair dari jerman yang bernama Bertolt Brecht (1898-1956) beкта bahwasnya “buta terparah adalah buta politik”karna dia tidak mendengar,tidak berbicara,dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik. Pemilhan umum pilkada di kabupaten tasikmalya pada tahun 2020 berjalan dengan cukup agresif sehingga peranan bawaslu didalam menyelesaikan sengketa yang terjadi perlu dilakukan dengan cepat dan tanggap agar masyarakat yang kontra terhadap pengumuman hasil pemilu yang dilakukan oleh kpu bisa berjalan dengan baik.karna ada pelanggaran yang belum terselesaikan oleh bawaslu sehingga ketika diberikan keputusan hasilnya banyak masyarakat yang berdemo di alun-alun kabupaten tasikmalaya karna ada kekegagalan.

Didalam artikel ini akan dibahas 3 pokok pentingnya Bawaslu dalam pengawasan pilkada kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 :

1. Peran Bawaslu didalam pengawasan pilkada kabupaten Tasikmalaya 2020 sebagai Lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran ketika berlangsungnya pemilu.
2. Kejanggalan Bawaslu ketika menjalankan wewenangnya pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020
3. Sebagai tugas dan wewenang dari Bawaslu dan kewajibannya yaitu untuk menciptakan pemilihan umum yang berintegritas dan harus meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pemilu agar tidak buta terhadap perpolitikan terutama ketika pemilu berlangsung.

Bawaslu dengan segala upaya agar Pemilihan Umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya terlaksana dengan demokratis dan memberikan edukasi terhadap masyarakat agar partisipasi didalam pemilihan umum Kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya semakin meningkat dan tidak buta terhadap politik. karna seorang penyair dari Germany mengatakan bahwasanya buta yang paling parah adalah buta terhadap politik. sehingga peranan Bawaslu tidak hanya mengawasi berjalannya pemilu akan tetapi harus mampu mengajak masyarakat agar tidak apatis terhadap perpolitikan dan mampu berkontribusi dengan maksimal terhadap perpolitikan terutama didalam pemilihan umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 sehingga proses dan berjalan langsungnya pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang sudah tercantum.

METODE PENELITIAN

Setelah melakukan wawancara kepada ketua BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya maka penelitian ini mampu tersusun dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Penelitian pada artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang mana jenis fenomenologi ini adalah suatu konsep atau fenomena yang terjadi secara sadar atau individual yang dialami oleh individu atau sekelompok ketika didalam masa hidupnya. Pada penelitian ini dengan narasumber yang ahli dalam bidangnya dengan judul artikel ini yaitu peran Bawaslu didalam pengawasan pemilu pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2020, Narasumber dari penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang mencakup sebagai ketua sekaligus komisioner. prosedur yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah dengan cara observasi dan wawancara. teknik yang dilakukan dalam menganalisis data untuk melihat BAWASLU dalam melaksanakan pengawasan ketika penyelenggaraan Pemilihan umum kepala daerah kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 dengan menggunakan cara Triangulasi data

diantaranya yaitu penyajian data dan mengambil kesimpulan.

PEMBAHASAN

Peran Badan Pengawas Pemilu

Bawaslu adalah salah satu Lembaga yang menjadi penyelenggara pemilu yang mana didalam tugas dan wewenangnya terdapat pencegahan terhadap pelanggaran yang sering terjadi ketika berjalanya pemilu (Hartika, 2019). Pada dasarnya dengan adanya Bawaslu ini agar mampu memberikan edukasi dan Kerjasama dengan masyarakat terhadap kejanggalan Bawaslu didalam kelancaran pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya. Diantara kepentingan yang sangat penting didalam pemilu adalah partisipasi masyarakat didalam pengawasan pemilihan umum, semakin banyak partisipasi dan kontribusi masyarakat didalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2020 maka akan semakin sedikit kecurangan yang akan terjadi. Disetiap forum masyarakat yang telah dirancang oleh Bawaslu merupakan salahsatu bentuk upaya agar masyarakat mampu mengawasi segala kecurangan yang terjadi.

Penelitian pada artikel ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis sejauh mana peran BAWASLU didalam pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020,dan juga m3engutarakan kendala BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan pengawasan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020.

Secara pengertian peran dapat diartikan dengan suatu pekerjaan atau tindakan yang senantiasa dilakukan oleh seseorang atau kelompok organisasi berdasarkan kedudukan yang sedang ia sandang.meskipun didalam setiap tugas dan wewenang yang dilakukan untuk memperlihatkan peran yang sesuai dengan setatus yang dijabat akan tetapi harus tetap berada dalam sebuah lingkup keteraturan berbeda sehingga menyebabkan peran dari setiap orang ataupun kelompok organisasi itu berbeda.(Sela, 2018)

Pendorong Keberhasilan Bawaslu

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demoktrasi sebagaimana bentuk dari Pancasila sila ke-4 didalam memilih pemimpin negara.pemilihan umum kepala daerah pada tahun 2020 yang dilakukan disebagian kabupaten /kota diseluruh Indonesia dan termasuk pada daerah tempat tinggal saya pribadi yaitu Kabupaten Tasikmalaya yang sama juga melaksanakan pemilihan umum kepala daerah.penyelenggara pemilu yang diadakan ini selain KPU yang mengadakanya ada juga Lembaga yang berfungsi untuk mengawasi berjalanya PILKADA yang disebut dengan badan pengawas pemilu, yang mana keberadaanya dari mulai pusat yang berada di nasional hingga ketingkat kabupaten atau kota dan juga sampai ke tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan. Pengawasan yang diadakan ini sangat berfungsi sekali untuk proses berjalanya

Pilkada agar sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang sudah ditetapkan, sehingga dapat mencegah dan mengurangi kecurangan ketika berjalanya pemilu . (RAMLAN SURBAKTI, 2015)

Berdasarkan latar belakang diatas munculah peran bawaslu kabupaten tasikmalaya ketika menjalankan sebuah pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah yang diselenggarakan pada tahun 2020, memiliki peran penting dan terlibat langsung dengan Bawaslu. pemilu dalam setiap yang diselenggarakan.bawaslu selain aktif didalam pengawasan bawaslu juga berperan didalam partisipatif dimana ketika menjalankan peranya bawaslu harus berhasil merangkul pihak atau lembaga yang terkait.

Peranan dalam pengawasan yang dikerjakan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada pemilu 2020 adalah bawaslu mengawasi dan mengontrol berbagai tahapan yang dilaksanakan dan tercantum didalam peraturan KPU yang menjelaskan tahapan didalam penyelenggaraan pemilu dan juga non pemilu. Adapun berbagai tahapan dalam penyelenggaraan pemilu yang diawasi langsung oleh Bawaslu adalah pengawasan proses data pemilih dan juga cara daftar yang akan memilih.pengawasan penataan dan penetapan daerah pemilih (DAPIL) ; daftar pemilih tetap (DPT) yang ada diluar negri.pengawasan logistik yang mana pada pengawasan logistic ini sangat berkaitan dan berhubungan dengan daftar pemilih tetap karna bersangkutan dengan jumlah yang akan dibutuhkan.setelah pengawasan terhadap logistic yang dibutuhkan Bawaslu juga berperan dalam pengawasan kampanye para calon yang telah diselenggarakan dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya tahu 2020,juga pengawasan ketika masa tenang,pengawasan rekapitulasi,pengawasan masa tenang,pengawasan,audit dana kampanye dan juga pengawasan sengketa yang sering terjadi di setiap pemilu dan sangat berperan penting sekali bawaslu agar tidak terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020.

Peranan bawaslu didalam melakukan pengawasan non tahapan terdiri dari dua bagian yaitu pengawasan secara netralitas dan juga pengawasan secara Suku,agama,ras,dan atar golongan). Yang mana yang disebut dengan bagian pengawasan secara netralitas itu adalah Bawaslu mengawasi dan mengontrol para aparatur negara seperti, Tentara, polisi,dan Aparatur Sipil Negara yang mana mereka harus berada didalam koridor netralitras, mereka boleh memilih hak pilihan mereka tapi mereka harus membatasi dan tidak boleh melakukan hak bersuara mereka semua harus netral berdasarkan dengan undang-undang yang telah tercantum. ketika proses penyelenggaraan pemilhan umum kepala daerah pada tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya, Bawaslu menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh ASN sehingga Bawaslu memberikan peringatan dan himbawan kepada pihak terkait, Bawaslu juga melakukan pencegahan dalam meminimalisir kecurangan dengan cara sosialisasi kepada mereka.

Sedangkan bagian yang ke dua yaitu pengawasan terhadap agama, ras, suku dan juga antar golongan, yang mana pengontrolan ini mampu memudahkan Bawaslu dalam pengawasan yang dilakukan karna Bawaslu mampu mengontrol dan memilih struktur lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya ini. banyak upaya yang dilakukan Bawaslu dan dari berbagai lapisan masyarakat dalam upaya meminimalisir kecurangan dengan cara sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat melek terhadap politik dan tidak mudah di interpersi oleh kandidat yang melakukan pelanggaran. Upaya yang dilakukan Bawaslu tersebut dilakukan beberapa hari sebelum pemilihan umum kepala daerah berlangsung.

Pelanggaran dalam Pemilu

Pelanggaran sering terjadi dengan berbagai alasan yang disampaikan sehingga masyarakat mampu terlenta oleh omonganya. bawaslu benar-benar memberikan edukasi terhadap masyarakat agar masyarakat mampu mengawasi dan ikut serta Bersama-sama dalam mengawal agar tidak terjadi kecurangan dalam pesta demokrasi. Adapun pelanggaran yang sudah dinyatakan melanggar dan sudah terbukti, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dalam segi penertiban dan menyelesaikan permasalahan harus sesuai dengan yang tertera dalam kewajiban, tugas dan wewenang Bawaslu didalam melakukan pengawasan pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya. Bawaslu akan melakukan penertiban ketika menemukan atau ada laporan pelanggaran yang terjadi baik ketika berjalanya pemilihan umum kepala daerah ataupun sebelum pemilihan umum kepala daerah berlangsung. sebagai contoh: pelanggaran yang dilakukan Sebagian calon dalam pemasangan alat peraga kampanye(APK) yang tidak memenuhi peraturan karna memasang APK tidak sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan, Bawaslu memberikan teguran kepada partai politik yang melakukan pelanggaran dengan memberikan surat peringatan, dan ketika partai yang bersangkutan setelah diperingati melebihi 2x24 jam maka Bawaslu bekerjasama dengan PANWASCAM(Panitia pengawas kecamatan)agar melepaskan APK tersebut secara paksa karna tidak mematuhi peraturan yang ada.

Akan tetapi jika ada jawaban dari pihak yang melakukan pelanggaran, Bawaslu akan mencatat pihak yang melanggar tersebut sebagai pelanggaran yang melanggar administrasi. Sedangkan ketika Bawaslu melakukan sebuah penindakan, yang harus dilakukan Bawaslu dalam penindakan adalah ketika ada sebuah pelanggaran yang melanggar secara tindak pidana yang sudah jelas melanggar terhadap peraturan undang-undang dasar dan sudah tertera. sebagai contoh kasus yang sudah terbukti dari laporan dan barang bukti politik uang atau orang kampung halaman sering mengetahinya dan menyebutnya dengan serangan fajar, Bawaslu telah menyelesaikanya dan menindaknya sesuai dengan peraturan agar pemilhan umum kepala daerah berjalan langsung dengan aman. selanjutnya bawaslu juga berperan penting didalam

menyelesaikan dan menertibkan terhadap pelanggaran pemilu dan berkordinasi dengan pihak yang bersangkutan agar efisien , sebagai contoh ketika ada pelanggaran di daerah kecamatan maka Bawaslu bekerja sama dan berkonsultasi dengan PANWASCAM (Panitia Pengawas Kecamatan), ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan kejanggalan daftar pemilih tetap (DPT) dan sudah terdaftar di komisi pemilihan umum dan juga Bawaslu harus berkordinasi dengan pihak yang bersangkutan yaitu DUKCAPIL (kependudukan dan pencatatan sipil) karena sistem kinerja yang dilakukan Bawaslu juga tidak hanya mengandalkan KPU saja. dan yang harus perlu kita ingat bahwasanya Bawaslu hanya bertugas mengawasi dan menindak langsung pelanggaran akan tetapi tanpa dibarengi dengan kekerasan atau menghakimi karna itu sudah termasuk diluar wewenang Bawaslu.

Banyak kejanggalan yang dirasakan Bawaslu ketika penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020, Adapun kejanggalan yang dirasakan Bawaslu terbagi dua yaitu interen dan exteren. Terkait kejanggalan yang dirasakan Bawaslu secara interen adalah kurangnya Sumber daya manusia dari Bawaslu karna dengan jumlah anggota yang sedikit dengan jumlah 5 orang tingkat Kabupaten, 117 yang tersebar di 3 kecamatan dan 351 yang tersebar di 351 Desa dengan harus mengawasi 1.332.978 pemilih, sehingga efektifitas didalam pengawasan kurang berjalan dengan lancar karna berbanding jauh antara pengawas dan pemilih.

Adapun permasalahan eksteren yang terjadi pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah terjadinya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) bukan pada daerah yang sudah ditentukan. selain itu ada laporan dari masyarakat bahwasanya didalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya terjadinya politik uang akan tetapi laporan tersebut ketika dikaji lagi oleh Bawaslu tidak memenuhi syarat pelanggaran karna pihak pelapor tidak memiliki saksi dan bukti yang kuat. setiap pelaku menggunakan segala cara agar tujuannya tercapai dalam mendapatkan dukungan dari para calon pemilih. adapun cara penyebaran politik uang dengan dua acara yaitu : (1) kampanye : yang mana didalam kampanye tersebut ada suatu proses yang telah dikonsep secara sadar dan dilaksanakan pada waktu tertentu dengan bertujuan agar mampu mempengaruhi calon pemilih dan diberikan imbalan berupa sembako ataupun atribut-atribut yang lainnya. (2) serangan fajar : yang mana didalam serangan fajar ini para tim sukses mendatangi rumah masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat memilih kandidat tertentu sehingga dapat menambah suara terhadap kandidat tersebut, biasanya kejadian ini sering kali dibarengi dengan praktik pemberian uang. (Abiyasa, 2019)

Selain itu praktik politik uang yang sering terjadi didalam pemilihan umum yang diberikan pelaku kepada calon pemilih terbagi menjadi beberapa bentuk dan wujud tertentu. adapun bentuk dan wujudnya terbagi menjadi dua bagian : pertama berupa uang : pada

lazimnya uang tunai yang sering dibagikan oleh para pelaku(pemberi) didalam membagikan uang ketika meyakinkan calon pemilih agar memilih kandidat yang memberikan uang tunai tersebut. kedua berupa barang yang dimaksud adalah : yang diberikan oleh pelaku bisa berupa sembako, kaos, ataupun dalam bentuk souvenir yang bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada calon pemilih dengan kepedulianya agar calon pemilih dapat memilih calon yang sudah memberikan keuntungannya berupa barang. (jafar, 2018)

Langkah-Langkah Bawaslu Dalam Mengatasi Pelanggaran dalam Pemilu

Adapun langkah yang dilakukan oleh Bawaslu dalam mengatasi kejanggalan atau pelanggaran terkait praktik politik uang adalah Bawaslu mengampanyekan dan mengumpulkan masa untuk mensosialisasikan terkait etika dalam pemilihan umum terutama di daerah Kabupaten Tasikmalaya. dengan mendatangi setiap kegiatan yang ada di masyarakat Bawaslu memulai langkah dalam upaya pencegahan praktik politik uang dan Bawaslu juga meyakinkan masyarakat agar tidak terjebak didalam praktik politik uang. (Sela, 2018) Bawaslu juga menghimbau masyarakat agar melaporkan apabila terjadi dari paslon yang melakukan kegiatan kampanye dan mengumpulkan masa yang dibungkus dengan uang atau praktik politik uang. Maka daripada itu Bawaslu didalam mengatasi kejanggalan yang terjadi bekerja sama dengan masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi yang dilakukan Bawaslu sehingga didalam pengawasan masyarakat ikut serta dan juga melek akan politik agar tidak mudah terbawa arus politik jahat terutama praktik politik uang ketika serangan fajar yang menyebabkan kurangnya etika didalam pemilihan umum kepala daerah 2020 dalam rangka menciptakan pemilu yang demokratis.

Penelitian yang dilakukan terhadap ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya “Dodi Juanda” bahwasanya tugas dan wewenang Bawaslu sudah diatur didalam undang-undang dan menjadi sebuah amanat yang harus dijalankan sesuai peraturan yang telah diatur didalam undang-undang. Berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2012 yang mana isinya menjelaskan tentang tugas, wewenang, dan kewajiban bawaslu dan salah satu isinya adalah Bawaslu bekerja untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu dalam upaya pencegahan atau mengurangi pelanggaran agar terlaksananya pemilihan umum yang adil demokratis. Bawaslu juga berperan penting ketika menghasilkan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 agar menghasilkan pemilu yang demokratis yaitu dengan meningkatkan partisipatif masyarakat agar masyarakat tidak mudah diintervensi oleh golongan tertentu sehingga masyarakat tidak apatis dalam pemilihan umum karna kebanyakan dari masyarakat yang apatis. baik tidak memilih atau diintervensi oleh golongan tertentu sehingga menyebabkan Bawaslu dan KPU kewalahan dalam menjalankan wewenangnya. (RAMLAN SURBAKTI, 2015) upaya yang dilakukan bawaslu dengan membuat cabang bawaslu di tingkat

kecamatan PANWASCAM singkatan dari pengawas kecamatan dan PKD juga merupakan singkatan dari panitia pengawas pemilu kelurahan atau desa. Yang bertugas ditingkat desa sehingga Bawaslu didalam tugas dan wewenangnya menciptakan pemilhan umum yang berintegritas mampu meralisasikan dengan mudah dan cepat. karna PKD yang berada disetiap desa memberikan edukasi tentang pemilhan umum kepala daerah agar masyarakat tidak apatis dan melek terhadap perpokitikan daerahnya.

Bawaslu dengan segala upaya agar Pemilihan Umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya terlaksana dengan demokratis dan memberikan edukasi terhadap masyarakat agar partisipasi didalam pemilihan umum Kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya semakin meningkat dan masyarakat tidak buta terhadap politik.karna seorang penyair dari Jerman mengatakan bahwasanya buta yang paling parah adalah buta terhadap politik. sehingga peranan Bawaslu tidak hanya mengawasi berjalnya pemilu akantetapi harus mampu mengajak masyarakat agar tidak apatis terhadap perpolitikan dan mampu berkontribusi dengan maksimal terhadap perpolitikan terutama didalam pemilhan umum Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 sehingga proses dan berjalan langsungnya pemiilhan umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya terlaksana dengan aman dan sesuai dengan pemilihan umum yang adil dan demokratis.

KESIMPULAN

Menurut hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan hasil menganalisis dari data-data dan juga pembahasan yang telah diutarakan ,kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan diatas bahwasanya Peranan Bawaslu didalam Pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 sangat berperan penting sekali karna Bawaslu salah satu lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum. Tugas dan wewenang Bawaslu didalam pemilihan umum yaitu mengawasi dan mengontrol berjalanya pemilhan umum agar berjalan dengan demokratis. Bawaslu didalam menjalankan peran nya harus bisa bekerjasama dengan semua pihak terutama dengan masyarakat sebagai calon pemilih harus benar-benar menjadi partisipasi sekaligus ikut serta mengawasi dari kejanggalan ketika berlangsungnya pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun Kejanggalan ketika berlangsungnya pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu alat peraga kampanye (APK) dalam pemasanganya tidak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan, Bawaslu menindak secara langsung dengan mencopot APK yang melanggar peraturan. Bawaslu juga memanggil pihak terkait dan memberikanya peringatan lampu kuning karna tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.Bawaslu berupaya sebaik mungkin dalam meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan berbagai upaya yaitu dengancara mensosialisasikan terkait apa saja yang harus dilakukan masyarakat dan juga etika sebagai calon pemilih. Selain itu, Bawaslu

juga mengajak kepada Masyarakat agar berkontribusi didalam pengawasan agar penyelenggaraan pemilu dapat dijalankan dengan lancar dan memperkecil celah pelanggaran dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dapat disimpulkan bahwasanya peranan bawaslu sangat berpengaruh sekali didalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya 2020 karna menurut ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya berkata “jika tidak ada Bawaslu maka tidak ada pemilu.” Dodi Juanda,SP. Peranan Bawaslu didalam mengawasi berjalannya pemilu dengan demokrasi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam partisipasi pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyasa, P. (2019). Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Jurnal Usm Law Review*, 2(2), 149. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>
- Hartika, F. Fitriana. (2019). PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM MENJALANKAN PENGAWASAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN PONOROGO. *Jurnal Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, 3(2), 5.
- jafar, muhammad. (2018). *EKSISTENSI DAN INTEGRITAS BAWASLU DALAM PENANGANAN SENGKETA PEMILU*. 2(1), 12.
- RAMLAN SURBAKTI. (2015). Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. In *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia*.
- Satrio, D. (2018). *PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK DI JAWA TENGAH*. 12(2), 15.
- Sela, M. (2018). *PERAN BAWASLU DALAM MENCEGAH MONEY POLITICS DALAM PEMLIHAN GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018*. 12(2), 2.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Pemilu
- [Www.pl.bawaslu.go.id/pages/read/sejarah-pengawasan-pemilu](http://www.pl.bawaslu.go.id/pages/read/sejarah-pengawasan-pemilu). diakses pada tanggal 20 Juni 2018

Www.rumahpemilu.org, sdiakses pada

tanggal 20 Juni 2018